



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR



DESA BATUBULAN
GIANYAR

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
DESA BATUBULAN-KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN (DP3)
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR: 566 /PR.08-PKS/5104/2022

NOMOR : 140/287/BATUBULAN

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Desa Batubulan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, SH.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Jalan Jata, Gianyar selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DEWA GEDE SUMERTHA, SH.,MH.
Jabatan : Perbekel Batubulan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama desa Batubulan - Sukawati, Gianyar yang berkedudukan di Jl. Raya Batubulan No.23, Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat.
 - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan.
 - c. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
 - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat;
 - f. Membangun jejaring dengan pemerintah desa agar program kerja Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat berkelanjutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dalam rangka membentuk dan memberikan materi Kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Kerja sama dalam pembinaan kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Kerjasama dalam membangun jejaring dengan Pemerintah Desa agar program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan menetapkan peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi eksternal terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi eksternal;
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan PIHAK KEDUA kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- e. PIHAK PERTAMA wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk seluruh kegiatan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh peserta program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dan mendapatkan laporan hasil program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar atau yang disebut sebagai PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pertemuan pada program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam bentuk pertemuan tatap muka (luring) dan tidak langsung (daring);

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (KAHAR) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA

- PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya persitiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5

ADDENDUM

Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum / Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertengangan dan perdebatan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadian negeri Gianyar.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian akan ada surat pemberitahuan PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Perbekel Batubulan



Dewa Gede Sumertha

PIHAK PERTAMA,
Ketua Komisi Pemilihan Umum



Putu Agus Tirta Suguna